

GEGARA PERBAIKAN JEMBATAN PINTU 10

Ruas Jalan di Kab. Tangerang Jadi Macet Total

TANGERANG (IM) - Sejumlah pengguna jalan yang melintas di jalan Kedaung, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang terlihat frustrasi. Pasalnya, banyak sejumlah pengguna jalan terpaksa pulang ke rumahnya lantaran terjebak macet yang mengakibatkan telat dalam bekerja, Kamis pagi, (6/6) sekira pukul 07.30 WIB

Rohman (45), salah satu pengguna jalan terlihat marah-marah dan frustrasi akibat terjebak macet di jalan Kedaung, Kecamatan Sepatan Timur tersebut karena menjadi telat dalam bekerja di perusahaannya.

"Gak tau ini bang macet

parah kayak gini. Kalau kata pengendara lain, ini akibat di pertigaan jembatan baru itu yang menghubungkan Sepatan Timur dengan Kecamatan Neglasari terjadi penumpukan kendaraan. Karena jembatan yang di pintu sepuluh Kota Tangerang itu ditutup," kata Rohman.

Selain itu, menurut salah satu pengemudi mobil, Dimas menambahkan, jika dia terpaksa lewat jalur Rawa Kucing dari arah Kota Tangerang menuju Kutabumi lantaran dialihkan jalurnya ke arah Neglasari lantaran adanya penutupan jembatan.

"Iya bang, terpaksa saya lewat sini. Ada perbaikan jembatan pintu sepuluh di sana," singkat Dimas. ● pp

DPUPR Pandeglang Survei Jembatan Ambruk di Cigeulis

PANDEGLANG (IM) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang telah melakukan survei jembatan ambruk di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang.

Jembatan yang ambruk merupakan jembatan penghubung tiga desa, yakni Desa Karyabuana, Desa Karangbolong dan Desa Banyuasin di Kecamatan Cigeulis.

Jembatan ambruk karena fondasinya mengalami longsor atau ambrol pada hari Rabu (5/6).

Menurut Kabid Bina Marga pada DPUPR Kabupaten Pandeglang, Ade Juliansah, pihaknya sudah menerima laporan atas adanya jembatan yang putus.

"Kemarin langsung disurvei sama staf UPT jembatan. Dan sedang kita hitung RAB nya untuk kita usulkan anggaran penanganannya," katanya, Kamis (6/6).

Usulan anggaran penanganan akan dilakukan kepada Tim Anggaran Permerintah Daerah atau TAPD. Adapun untuk akses warga sementara melalui jalur alternatif.

"Untuk jalur alternatif ada. Sudah dilakukan survey oleh tim ke lapangan dengan didampingi oleh Sekretaris Camat dan Kasi Pembangunan Kecamatan Cigeulis," katanya.

Terkait, adanya jembatan ambruk ini, dari pihak BPBD juga sudah turun. "Dan rencananya akan kita pasang rambu-rambu lalu lintas. Sebagai media informasi bahwa ada jembatan ambruk yang belum bisa dilalui oleh kendaraan," katanya.

Selanjutnya, Tim dari DPUPR akan melakukan survei secara keseluruhan. Hal itu perlu dilakukan karena bentangan jembatan lumayan panjang.

"Bentangannya kurang lebih 12 meter. Rencana kalau memungkinkan kita akan pasang buat penyebrangan orang dulu, yang mudah-

mudahan bisa dipasang," katanya.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana mengatakan, jembatan yang ambruk melintasi Sungai Cipaseh.

"Jembatan yang ambruk merupakan penghubung Desa Karyabuasih, Desa Karangbolong dan Desa Karyabuana," katanya.

Jembatan penghubung ketiga desa saat ini terputus. Penyebab ambruknya jembatan belum bisa diperkirakan karena menunggu hasil pengecekan oleh tim teknis. "Korban terdampak nihil," katanya.

Kapolsek Cigeulis, Iptu Erwin Heryadi mengungkapkan, dari hasil pengecekan, jembatan tersebut merupakan akses jalur utama penghubung dari Desa karyabuana menuju Desa Karangbolong menuju desa Banyuasin bagi masyarakat pengguna Kendaraan Roda empat," katanya.

Faktor utama terjadinya ambruk diduga karena memang sudah tua (sudah rapuh) dikarenakan usia jembatan yang sudah cukup lama kurang lebih 49 tahun semenjak dibangun pada tahun 1975 oleh Pemkab Pandeglang Pandeglang.

"Untuk sementara akses jalur alternatif menuju Desa Banyuasih dialihkan ke jalur Kampung Masjid keluar di Kampung Babakan langsung Desa Karangbolong, dan akses jalur alternatif tersebut hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua," katanya.

Pihak Desa Karangbolong sudah melaporkan atau mengkoordinasikan kejadian tersebut ke pihak Kecamatan Cigeulis melalui Sekmat dan Kasi Pembangunan.

"Yang dilanjutkan ke pihak BPBD dan DPUPR Kabupaten Pandeglang," katanya. ● pra



HARGA BERAS NAIK

Pekerja mengangkut beras di Pasar Induk Rau Serang, Banten, Rabu (5/6). Menurut pedagang harga beras kualitas premium dan medium mengalami kenaikan Rp1.000 perkilogram akibat masa panen berakhir hingga suplai beras mulai berkurang.

Zulkifli Hasan Tinjau Perkembangan UMKM di Sentra Batik Banten

Kerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak menjadi kunci utama agar produk-produk yang ada di daerah menjadi tuan di tempatnya sendiri, selain dapat melakukan ekspor, kata Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan.

SERANG (IM) - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan meninjau sentra batik di Kota Serang, Banten, Kamis (6/6), untuk melihat langsung perkembangan usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM). "Kita melihat langsung perkembangan UMKM di daerah dan saat ini kita ke sentra batik Banten, tadi batiknya juga bagus-bagus," kata Zulkifli Hasan di sentra batik

Banten. Ia mengatakan kerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak menjadi kunci utama agar produk-produk yang ada di daerah menjadi tuan di tempatnya sendiri, selain itu juga agar dapat melakukan ekspor.

"Kita bisa merajai ekspor produk-produk kita tapi ini perlu kerja keras dan kerja sama dengan semua pihak," katanya.

Untuk memperkenalkan produk UMKM, pemerintah akan menggelar kegiatan pameran yang diikuti oleh 150

negara di Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta pada 12 Oktober 2024.

"Nanti ada pameran besar yakni ekspo Indonesia pada 12 Oktober, maka tadi saya minta ke wali kota untuk disortir UMKM terbaik untuk ikut karena akan ada 150 negara yang datang," katanya.

Sedangkan untuk stan UMKM, ia mengatakan akan dibayarkan oleh pemerintah daerah.

UMKM ikut mempromosikan dan menjual produknya agar dikenal di level nasional dan mancaneg-

ara karena perlu kerja sama agar produk daerah Indonesia mendunia.

Sementara itu, pemilik Batik Banten, Asriana Kenadiani mengatakan untuk pemasaran sudah sampai ke tingkat nasional dan mancanegara.

"Dalam sebulan hampir 3.000 kain batik habis terjual. Untuk pengiriman mulai dari Malaysia, Jepang dan di daerah Pulau Jawa," katanya.

Sedangkan untuk harga batiknya sendiri mulai dari Rp175.000 untuk yang standar dan Rp3 juta untuk batik premium. ● pra

Turnamen Mini Soccer Antar SKPD Semarakkan HJB Ke-542

BOGOR (IM) - Pertandingan mini soccer antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyemarakkan peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542 di Kabupaten Bogor digelar di Kabupaten Bogor.

Turnamen tersebut diinisiasi oleh Ikatan Putra Putri Keluarga KORPRI (IKAPRI) Kabupaten Bogor. Mewakili Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Asnan membuka turnamen tersebut di Lapangan Sepak Bola Kecamatan Sukaraja, Rabu (5/6).

Turut hadir pada pembukaan turnamen tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Asnan mengatakan, turnamen mini soccer yang diadakan ini, bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola. Tetapi lebih dari itu, mini soccer mengandung filosofi yang selaras dengan semangat Hari Jadi Bogor ke-542, yakni babarengan, akur dan makmur.

"Dengan jumlah pemain yang sedikit, mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama tim. Di lapangan, setiap pemain memiliki peran penting dan saling mendukung satu sama lain. Kekompakan dan kerjasama tim adalah kunci utama untuk meraih kemenangan," kata Asnan.

Ia berkilah, dalam membangun Kabupaten Bogor yang maju dan sejahtera, dibutuhkan kerjasama dari



Turnamen mini soccer untuk menyemarakkan HJB ke-542.

semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Sinergi dan kolaborasi menjadi sebuah keharusan, agar kita dapat mewujudkan

Kabupaten Bogor yang lebih baik di masa depan.

"Saya mengajak, dengan semangat HJB ke-542, marilah kita jadikan lomba

mini soccer ini sebagai ajang untuk mempercepat persatuan dan kesatuan, serta menjunjung tinggi sportivitas," tandas Asnan. ● gio

Pansus V Tegaskan Pemerintah Harus Serius Wujudkan Pertanian Organik di Jabar

BANDUNG (IM) - Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai pemerintah daerah harus turun tangan langsung dan serius dalam mewujudkan tujuan Jawa Barat dalam pengelolaan pertanian organik.

Hal itu menjadi fokus pembahasan di beberapa daerah pertanian di Jawa Barat dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Enjang Tedi mengatakan, setelah Pansus V melakukan kunjungan kerja ke daerah pertanian mulai dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut hingga Kabupaten Tasikmalaya ada beberapa catatan penting dalam mendukung penyusunan raperda tentang pertanian organik.

Misalnya pertanian di kawasan Pagerageung yang digarap Kelompok Tani Mekar Mukti, Kabupaten Tasikma-



Wakil Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Enjang Tedi saat di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya.

laya sudah ada beberapa dari kelompok tani yang sudah menerapkan pertanian organik dan menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing.

Namun, dari informasi beberapa kelompok tani masih terdapat kendala mulai dari masalah regulasi hingga sumber daya manusia yang masih minim. Karena itu, dalam hal ini pemerintah daerah sangat berperan penting

untuk mendukung pertanian organik khususnya bagi kalangan kelompok tani.

"Sehingga support system yang menyeluruh dari pemda setempat sangat dibutuhkan para petani organik. Bukan hanya soal regulasinya saja tetapi bagaimana mempersiapkan dan memfasilitasi edukasi baik itu melalui pelatihan-pelatihan khusus tanaman organik maupun



upaya lainnya," ujar Enjang di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (31/5).

Kemudian persoalan sarana prasarana, Enjang melanjutkan tidak luput dari perhatian pemda setempat untuk mendukung kebutuhan para pelaku pertanian organik.

Selanjutnya, masalah berikutnya ialah tentang pemasar-

rannya. Harus diakui bahwa pemasaran ini kerap menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap mudah. Lagi-lagi pemerintah harus berperan aktif untuk turut sukseskan pertanian organik ini.

Artinya pemerintah juga agar ada penekanan bahwa sebenarnya beberapa hal untuk menopang agar para petani konvensional itu mau beralih ke pertanian organik

itu perlu ada keberpihakan dari pemerintah daerah salah satunya regulasi ini.

Dengan disusunya perda pertanian organik ini merupakan bagian dari perlindungan sekaligus kepastian payung hukum bagi para petani organik, kata Enjang. Justru dengan adanya perda tersebut, tambah Enjang, sebenarnya agar menjadi bahan pertimbangan para petani

bahwa peralihan dari pertanian konvensional ke organik itu akan mendapat peningkatan produktivitas. Bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, karena nilai pertaniannya juga meningkat.

Bukan hanya nilai pertaniannya saja yang meningkat dalam segi kualitas. Tetapi secara sertifikasi perlu ada insentif yang harus dikeluarkan sesuai dengan regulasi tentang pertanian dan keorganikannya.

Perlu diupayakan agar pemerintah daerah juga pemerintah daerah punya lembaga sertifikasi tersendiri terutama untuk produk yang pemasarannya untuk lokal Indonesia beda dengan untuk ekspor.

"Kalau untuk ekspor kan lembaga sertifikasinya harus pihak ketiga. Sementara untuk komoditi lokal cukup disertifikasi oleh pemerintah daerah tentunya dengan standarisasi yang sesuai regulasi yang sudah ada," pungkas Enjang. ● lys